



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

# **INVESTASI DI INDONESIA PASCA OTONOMI DAERAH : PELUANG DAN TANTANGAN**

**PIDATO KUNCI  
SEMINAR INVESTASI FORUM KOORDINASI PERENCANAAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH**

**Oleh:**  
**GINANDJAR KARTASMITA**  
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

**BOGOR  
2008**

# INVESTASI DI INDONESIA PASCA OTONOMI DAERAH: PELUANG DAN TANTANGAN

**GINANDJAR KARTASASMITA**  
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

-----

Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk dapat menghadiri seminar investasi yang bertemakan **“Membangun Investasi Sebagai Kunci Suksesnya Pertumbuhan Ekonomi di Daerah”**.

Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah mengambil prakarsa menyelenggarakan seminar ini dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional dan daerah baik dari kalangan pemerintah maupun swasta yang secara langsung berkecimpung dalam bidang investasi di daerah ini.

Seminar ini diselenggarakan dalam suasana nasional yang penuh keprihatinan meskipun juga ada secercah harapan.

Melambungnya harga minyak dunia yang mencapai lebih dari 100 US Dollar per barrel telah menciptakan tekanan ekonomi yang cukup berat bagi pemerintah dan masyarakat. Bersamaan dengan itu telah terjadi pula peningkatan harga-harga pada berbagai kebutuhan pokok manusia terutama bahan pangan. Kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, diantaranya dalam bentuk pemberian subsidi dalam beberapa bidang, tentu saja akan makin terbatas. Hal ini jelas menimbulkan dampak sosial yang cukup kompleks, yang jika tidak kita tanggulangi dan kelola dengan hati-hati akan dapat memicu gejolak dalam masyarakat.

Jika kita cermati kondisi bangsa kita, setelah 10 tahun reformasi, kemiskinan dan pengangguran belum menunjukkan tanda-tanda teratasi, dan kerawanan sosial masih terus berlangsung. Pertumbuhan ekonomi, setidaknya hingga saat ini masih didukung oleh peningkatan konsumsi ketimbang oleh investasi yang baru. Kebijakan ekonomi makro, yang telah menunjukkan hasil menciptakan stabilitas, belum memberikan optimisme terhadap upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan antardaerah dan belum mampu memacu pertumbuhan ekonomi bukan hanya pada tingkat nasional tetapi juga regional secara berimbang.

Krisis ekonomi dunia, seharusnya bagi bangsa tidak menjadi "krisis" kalau saja kita pandai memanfaatkan potensi yang kita miliki, baik potensi keragaman energi maupun sumber daya pertanian. Seharusnya karena "krisis" itu kita harus menjadi makin kaya bukan makin terpuruk.

Dalam situasi dan kondisi yang sedemikian itulah, pemerintah dituntut untuk berkreasi dan berinovasi guna mengatasi masalah dan memenuhi berbagai tuntutan dan harapan masyarakat. Inovasi menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan pemerintah menjadi lebih bermakna di mata rakyatnya.

Namun kita sadari memang pembangunan tidak dapat hanya dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemeran utama pembangunan haruslah masyarakat sendiri. Keberhasilan pemerintah membangun harus diukur dan ditunjukkan dengan indikator keberdayaan masyarakat untuk membangun dirinya secara mandiri. Kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah dan layanan publik harus dikembangkan secara berimbang untuk membangun peran ekonomi masyarakat yang kuat.

Peluang kearah itu sebenarnya cukup besar.

Dewasa ini sedang terjadi proses perubahan besar yang mempengaruhi struktur dan karakteristik ekonomi masyarakat.

Perubahan fundamental pertama yang mempunyai dampak langsung pada perekonomian nasional, adalah globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan berarti pasar dunia akan makin terbuka bagi produk-produk kita, dan sebaliknya potensi domestik kita pun akan makin terbuka pula bagi masuknya modal, teknologi dan gagasan-gagasan yang dapat membawa kemajuan.

Di pasar domestik, globalisasi menyebabkan terjadinya proses internasionalisasi sistem budaya dengan dampak langsung terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Pergeseran pola konsumsi ini –lepas dari preferensi kita baik sebagai individu maupun sebagai bangsa– memang dapat menggeser permintaan produk-produk nasional yang tidak memiliki ciri budaya "internasional", tetapi dapat juga membuat produk nasional kita menjadi produk internasional.

Ditinjau dari sisi permintaan, konsumen akan membutuhkan barang dan jasa yang makin beragam serta menuntut jaminan kualitas yang lebih tinggi. Tuntutan konsumen yang makin tinggi tersebut seharusnya mendorong para pelaku ekonomi di sektor industri manufaktur dan jasa untuk menerjemahkan selera konsumen pada pola produksi.

Sementara itu, ditinjau dari sisi penawaran, teknologi berperan makin besar, dan mengubah sistem produksi, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang membuka kemungkinan-kemungkinan yang belum terlihat batas-batasnya.

Pada pasar ekspor, kesempatan untuk memanfaatkan pasar dunia yang berkembang karena hilangnya hambatan perdagangan akan makin besar. Menurut perkiraan para pakar, negara-negara

industri baru dan negara-negara berkembanglah yang justru akan menikmati peningkatan perdagangan lebih besar dibandingkan dengan negara-negara maju. Negara-negara industri baru dan negara-negara berkembang juga menjadi pasar yang makin potensial diantara mereka sendiri karena proses industrialisasi dan peningkatan daya beli rakyat mereka, sehingga negara-negara industri baru tidak perlu tergantung hanya kepada pasar negara maju.

Perubahan fundamental kedua berkenaan dengan dinamika pembangunan ekonomi nasional itu sendiri, yaitu transformasi struktur perekonomian dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Proses transformasi ini dengan sendirinya mempengaruhi pula pola produksi dan pola konsumsi masyarakat. Ekonomi kita bisa tetap berbasis pertanian tapi yang dikelola secara industri, artinya yang berubah adalah budaya agraris menjadi budaya industri.

Proses industrialisasi akan menghasilkan permintaan yang meningkat akan bahan-bahan baku dan barang-barang setengah jadi, serta komponen-komponen bagi industri pada berbagai tahapannya dari hulu sampai ke hilir.

Dengan demikian, permintaan akan berbagai jenis barang bukan hanya meningkat, tetapi makin beragam. Di bidang jasa, juga terjadi proses yang sama, karena proses transformasi yang sedang terjadi juga menyangkut jasa-jasa, yang akan makin penting perannya dalam struktur ekonomi yang modern. Permintaan akan jasa-jasa akan makin besar, baik volume, jenis, maupun kualitasnya.

Kesemuanya itu diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan, dengan demikian, daya belinya. Hal ini berarti pasar domestik akan terus membesar dengan permintaan akan produk-produk yang makin tinggi kualitasnya, makin luas, dan

makin banyak macamnya, serta makin canggih teknologinya. Proses perubahan itu, baik yang terjadi di dalam bangsa kita sendiri, maupun dalam perekonomian dunia, dengan sendirinya tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait. Proses perubahan global juga berpengaruh pada proses transformasi struktural dan perkembangan pendapatan masyarakat di dalam negeri. Namun, kedua-duanya menghasilkan hal yang sama, yaitu memberikan kesempatan kepada dunia usaha nasional untuk berkembang dan berkembang dengan kecepatan yang tinggi, karena proses globalisasi itu sendiri bergerak dengan cepat. Seharusnya proses transformasi dalam perekonomian kita, juga berlangsung dengan tempo yang tinggi.

Untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu, ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, daya saing, dan kedua, kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Peluang yang terbuka untuk mengembangkan usaha dalam perekonomian yang makin terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi dunia hanya bisa dimanfaatkan kalau dunia usaha kita memiliki daya saing. Usaha nasional sudah tidak bisa lagi bersandar pada proteksi untuk pasar dalam negeri dan subsidi untuk pasar ekspor. Oleh karena itu, peningkatan daya saing harus menjadi agenda utama pembangunan nasional kita. Daya saing dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi serta partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam perekonomian.

Berkaitan dengan itu syarat yang kedua, kewirausahaan memerlukan syarat-syarat pengetahuan untuk bisa berusaha dalam dunia perekonomian modern, seperti pengetahuan yang minimal mengenai modal, pasar, manajemen usaha, teknologi, dan informasi. Namun, lebih mendasar dari itu adalah pengembangan kebudayaan berusaha (*business culture*). Masyarakat yang tidak memiliki kecenderungan untuk berusaha, sulit untuk maju dan berkembang

apalagi bersaing dalam ekonomi pasar yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Berbagai hal tersebut di atas menggambarkan betapa besarnya peluang yang terbentang di muka kita untuk mendorong berkembangnya dunia usaha nasional sebagai kekuatan utama pembangunan. Namun, kita juga dihadapkan pada tantangan, yang kalau kita tidak bisa atasi, jangan harap kita dapat memanfaatkan peluang-peluang itu. Jangankan memasuki pasar ekspor, pasar dalam negeri saja bisa lepas dari tangan kita karena nantinya setelah semua hambatan baik tarif dan nontarif sudah hilang, tidak ada lagi pasar domestik atau pasar internasional, yang ada cuma pasar.

Dengan reformasi yang menghasilkan desentralisasi dan otonomi daerah membuat setiap daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam rangka mengambil keputusan dan kebijakan bagi daerahnya masing-masing, termasuk pula di dalamnya kebijakan mengenai investasi daerah.

Fokus penyelenggaraan otonomi daerah adalah penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah.

Otonomi daerah telah menciptakan peluang bagi daerah guna berkembang sesuai dengan realitas dan kondisi masyarakat setempat. Dalam hal ini pemerintah pusat hanya berperan selaku pengarah yang berfungsi untuk memberikan petunjuk agar arah pembangunan daerah-daerah tetap pada jalur yang sinergis satu sama lain dan sinergis secara nasional.

Dengan lebih berperannya daerah, maka dalam bidang ekonomi dan investasi daerah perlu mengembangkan *comparative advantage* dan *competitive advantage* yang dimilikinya.

*Comparative advantage* bersifat unik. Setiap negara dan daerah memiliki keunggulan yang berbeda satu dengan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan teknologi, ke depan dapat dipastikan akan terjadi semacam konvergensi antara *comparative advantage* dan *competitive advantage*.

*Comparative advantage*, seperti upah buruh yang murah, ketersediaan sumber alam dan posisi geografis memang masih perlu dimanfaatkan namun secara bertahap akan tergeser oleh konsep *competitive advantage*, yang dihasilkan inovasi dan teknologi.

Jawa Barat adalah propinsi yang sangat potensial untuk investasi. Dengan penduduknya yang besar, sumber daya alam yang cukup memadai, prasarana relatif maju dibanding daerah lain karena kedekatannya ke ibu kota, dan kehadiran lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian yang terkemuka di tanah air, Jawa Barat dapat menggabungkan kedua unsur keunggulan, komparatif dan kompetitif tersebut, yang membuat propinsi ini seharusnya paling siap untuk menjadi tuan rumah investasi. Di Jawa Barat, kabupaten Bogor adalah wilayah yang paling depan dan paling maju dalam berbagai keunggulan tersebut.

Untuk dapat menggerakkan dinamika ekonomi dengan mengaktualisasikan potensi menjadi kekuatan nyata ekonomi diperlukan rezim investasi yang menarik dan merangsang, serta bebas hambatan. Salah satu diantaranya adalah pelayanan satu pintu. Salah satu aspek yang penting dalam konsep satu pintu ini, selain perijinan adalah ketersediaan pelayanan informasi. Disini kita sangat ketinggalan dibanding negara-negara tetangga kita.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka menarik investasi masuk ke daerah, DPD berinisiatif untuk menyelenggarakan temu investor dengan daerah, dalam sebuah kegiatan yaitu *Indonesian Regional*

*Investment Forum* atau yang disingkat IRIF yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 26-27 Mei 2008.

Inisiatif DPD ini diambil dengan melihat potensi yang sangat besar yang dimiliki Indonesia namun masih kurangnya promosi yang dilakukan serta masih banyaknya kesulitan yang dihadapi para investor untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di daerah.

Untuk mengatasi kendala itu, melalui event ini para Gubernur, Bupati, Walikota dan unsur-unsur pimpinan daerah serta dunia usaha dapat bertemu dan berdiskusi langsung dengan para peminat investasi dari dalam maupun luar negeri, seraya menawarkan potensi investasi di daerah masing-masing. Dalam kegiatan itu IRIF membuka kesempatan para peserta untuk berdiskusi dengan para pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidangnya masing-masing termasuk mengenai kendala yang dihadapi oleh daerah dalam menarik investasi.

Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan semoga dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan selama seminar ini maupun dalam upaya membangun Jawa Barat menjadi propinsi nomor satu.

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA,

PROF.DR.IR. GINANDJAR KARTASAMITA